

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.¹ Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya².

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008).³ Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.⁴

¹Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168

²Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), edisi revisi, h. 157

³Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁴Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi pasar persaingan bebas.

2. Karakteristik usaha kecil menengah

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.

- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.⁵

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁶

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan

⁵ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010) ,h. 32

⁶ *Ibid*, h.33

omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	> 2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : jurnal Strategi UMKM menghadapi Pasar Bebas Asean

b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasar Perkembangan

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁷

4. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

- a. Usaha mikro pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyah*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan

⁷ “Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan Tentang Usaha Kecil Menengah” journal Pengembangan UMKM di Indonesai 20014. h.55

yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun 'aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-'aqidah Al-Islamiyyah) yang didalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya.
- c. Berkarakter ta'abbudi (thabi'un ta'abbudiyun). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan (nizham rabbani).
- d. Terkait dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam perlindungan Islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastis (al-murunah), al-murunah didasarkan pada kenyataan bahwa al-Qur'an dan al-Hadist yang keduanya dijadikan sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (al-maudhu'iyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.

- g. Realistis (al-waqi'yyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
 - h. Harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak.
 - i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal).⁸
6. Ciri-Ciri Usaha Mikro
- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
 - b. Tepat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
 - c. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
 - d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
 - e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank;
 - f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termaksud NPWP.⁹

⁸ Muhammad Reztri Irfani, "Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam" (IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islman, Ekonomi Islam, 2016), h. 21

⁹ *Ibid*, hlm 23

B. Pemberdayaan kaum perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Kaum Perempuan

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang lebih adil, setara antara laki-laki dan perempuan serta mengikutsertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Moser, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Sedangkan pemenuhan kebutuhan strategis dapat dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader perempuan.¹⁰

Menurut Parsonos menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterlampiran, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang

¹⁰ 23Titik sumarti, "strategi nafkah rumah tangga dan posisi perempuan" dalam secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian), kementerian sosial RI direktorat jendral pem,berdayaan keluarga, 2010, hlm. 212

menjadi perhatiannya.¹¹ Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang mencakup kebutuhan seseorang yang diinginkan baik berupa individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi segala keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sebuah sumber daya yang di dalamnya dan yang terkait dalam aktivitas sosialnya.

Memberdayakan perempuan sebagai mitra setara laki-laki adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, terwujud dalam kesatuan peran, berdasarkan pada sikap dan perilaku, saling membantu dan mencakup semua bidang kehidupan.

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, h.58

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Tujuan akhirnya ialah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan dengan tujuan agar memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan, dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.¹²

2. Konsep Pemberdayaan

- a. Konsep Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan.
- b. Kedua, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam¹³

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat lima prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama), h.58

¹³ Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni 2010). h.44

¹⁴ Herliawati Agus P, *Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi*, FISIP UI 2015, h.79

a. Welfare (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama berikut.

Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

Sementara pencapaian pendidikan merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.

b. Access (Akses)

Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek

penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

c. Consientisation (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

d. Participation (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat.

e. Equality of Control (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

4. Pemberdayaan menurut Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan

holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "community empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Masih dalam pengalaman Al-Qur'an, Jim Iffe mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka

yang lebih baik¹¹. Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah ”upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu’afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya Pengembangan Masyarakat Islam, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan

berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual an sich.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

5. Tujuan dari Pemberdayaan Perempuan

Tujuan dari pemberdayaan perempuan, antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini;
- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk

menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri;

- d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat local sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.
 - e. Mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki
 - f. Menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya
 - g. Tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat.
6. Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan

berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

a. Penayadaran

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain.

b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberdayakan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut capacity building, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang suda diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

d. Tahap capacity building dan networking; tahapan ini mencakup:

- 1) Melakukan pelatihan, workshop, dan sejenisnya untuk membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

- 2) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya.
- 3) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal.
- 4) Tahap pelaksanaan dan pendampingan
- 5) Melaksanakan kegiatan yang telah di susun dan direncanakan bersama masyarakat.
- 6) Tahap evaluasi mencakup:
 - a) Memantau setiap pemberdayaan yang dilakukan
 - b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
 - c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi.
- 7) Tahap terminasi; tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam buku blabla maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata¹⁵ dalam pembangunan. Di samping itu kemandirian

¹⁵ DR. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gemani Isnaini, 2004), h.82

mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

7. Strategi Pemberdayaan

Menurut Freire dalam bukunya Aziz Muslim bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukannya proses penyadaran masyarakat dengan mengetahui dan sadar akan program yang dibicarakan, masyarakat akan tergerak untuk ikut memikirkannya. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki dengan apa yang akan dibicarakan atau yang akan dilakukan¹⁶

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan khususnya dalam penelitian ini adalah di bidang UMKM.

8. Indikator Pemberdayaan perempuan

Bagi perempuan miskin (WRSE) setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator yaitu:

- a. indikator keluaran (output indicator) di tandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin (WRSE).

¹⁶ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, h.14.

- b. Indikator hasil (income indicator) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang di berdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka.
- c. Indikator dampak (impact indikator) ditandai dengan perempuan miskin (WRSE) yang di berdayakan telah mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin.¹⁷

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tidak saja di tuntutan untuk memiliki keberdayaan secara ekonomi, akan tetapi tidak kalah penting memiliki keberdayaan secara sosial. Seperti yang di kemukakan oleh Lorrancaine Guitierrez, keberdayaan di tandai dengan peningkatan kemampuan yaitu: kemampuan personal, interpersonal dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu dalam memahami kekuatan yang di milikinya. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya. Sedangkan kemampuan politik adalah kemampuan dalam mengambil keputusan bersama secara formal maupun informal.¹⁸ Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter. Perempuan harus dapat berperan aktif dalam

¹⁷ Titik sumarti, "strategi nafkah rumah tangga dan posisi perempuan" dalam secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian), kementerian sosial RI direktorat jendral pem,berdayaan keluarga, 2010, hlm. 212

¹⁸ 25Rokma Murni, "pemberdayaan perempuan pasca reformasi" dalam secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian), kementerian sosial RI Direktorat jendral pemberdayaan sosial direktorat pemberdayaan keluarga (tkp:2010) hlm, 333

beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau itu semua telah terealisasi, maka perempuan benar-benar terberdayakan.

9. Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Departemen Keuangan RI no.per-19/PB/2005 tentang petunjuk penyaluran dana bantuan modal usaha bagi keluarga binaan sosial program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu klompok usaha bersama(KUBE) dan lembaga keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah dalam upaya menggerakkan ekonomi keluarga dan komunitas, khususnya dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, atau dalam istilah Ismawan, dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat menurut Kethi, secara kasar dapat dikelompokkan menjadi

- a. Kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, (semua dilakukan dalam skala terbesar dan susten), pengerajin kecil, penjahit, makanan kecil, dan sebagainya
- b. Kegiatan-kegiatan tersier: transportasi, kegiatan sewa-menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.
- c. Kegiatan-kegiatan distribusi: pedagang dan jenis usaha lainnya.
- d. Kegiatan-kegiatan jasa lain, pengemban, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret, juru potret jalanan, dan sebagainya.

Meningkatkan usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang mempunyai fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi keluarga dan komunitas maka upaya pemberdayaannya suatu tuntutan yang harus di wujudkan. Pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

C. Ekonomi keluarga

1. Ekonomi keluarga

Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula menggunakan pendapatannya tersebut.¹⁹

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, et. al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta 2007, h.15

Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk kehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia.²⁰ Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah suatu kekerabatan yang juga merupakan sebuah tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia.²¹

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya dan pelaku utama yang berperan penting dalam mencari nafkah adalah seorang ayah akan tetapi tidak ada hambatan pula jika seorang istri ingin membantu suaminya agar terpenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya. Menurut Geonawan Sumodiningrat mengatakan ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.²² Sedangkan Menurut Mawardi, Keluarga dapat dibentuk melalui

²⁰ Sumber: diposkan oleh Wanita Pekerja; dalam <http://id.shvoong.com/sosial-sciences/econimic/2178148-pengertian-ekonomi-keluarga/#ixzmer9yvx>, diakses pada Kamis 03 Maret 2017 jam 08.00 WIB

²¹ Sumber: diposkan oleh Wanita Pekerja; dalam <http://id.shvoong.com/sosial-sciences/econimic/2178148-pengertian-ekonomi-keluarga/#ixzmer9yvx>, diakses pada Kamis 03 Maret 2017 jam 08.00 WIB

²² Goenawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 69

persekutuan-persekutuan individu karena adanya hubungan darah perkawinan atau adopsi.²³

2. Indikator Peningkatan Ekonomi dalam Keluarga

a. Terpenuhinya kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia seperti sandang pangan dan papan.

1) Sandang adalah pakaian diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya dimana pakaian untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis - jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah untuk tidur dan sebagainya yang berfungsi sebagai pelindung dan memberi kenyamanan.

2) Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia, pangan dibutuhkan manusia secara kualitatif maupun kuantitatif terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.

3) Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal yang berfungsi untuk bertahan diri atau tempat tinggal keluarga.

b. Terpenuhinya kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, lemari, televisi, radio, tempat tidur, kendaraan serta pendidikan dan hiburan.

Di antara permasalahan rumah tangga adalah sekitar ekonomi. Tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan tentram. Sekalipun ekonomi bukanlah

²³ Mawardi, Nurhidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 212

segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim mampu mencapai kondisi standar yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

3. Ekonomi Keluarga Dalam Islam

Imam Nawawi (dalam bukunya Cahyadi Takariawan) menyebutkan bahwa yang dimaksud kemampuan standar keluarga adalah sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.²⁴

Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi standar kecukupan dan kemampuan kebutuhan ekonomi keluarga dalam Islam adalah terpenuhinya :

- a. Cukup makan dan memenuhi standar Gizi
- b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, bersuci, dan sebagainya
- c. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu, seperti pakaian untuk sholat jum'at dan sholat hari raya.
- d. Cukup papan yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk dihuni, luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat orang yang lewat.
- e. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga

²⁴ Cahyani Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam (tatanan dan peranan dalam kehidupan masyarakat)*, (Solo: Intermedia, 2001) h.305

- f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya
- g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit
- h. Tabungan haji dan umroh.²⁵

Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan sistem produksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah.

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

- a. Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia.

Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal dengan al-kulliyat al khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima had diatas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

²⁵ *Ibid*, h. 306

- b. Hajiyat, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.
- c. Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

4. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran:

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar.
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
- e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya asing, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh.

Salah satu keunggulan UMKM adalah, ia terkadang sanga lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru

ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sector ekonomi riil.

Dalam buku *Economic Development* Todaro mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia pasca krisis sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan “pembangunan yang benar-benar berorientasi pada rakyat”. UMKM atau koperasi dipilih sebagai representasi ekonomi rakyat karena selain menyerap tenaga kerja sekitar 90 persen, juga karena memberi nilai tambah sekitar 56 persen dimana sector pertanian memegang peran yang sangat besar (sekitar 70 persen).

5. Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai penduduk yang sangat padat terutama pada kota-kota besar, dengan jumlah penduduk yang sangat padat, memberikan dampak banyak mengalami masalah sosial.

Jika dilihat dari peran perempuan dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan :

a. Peran tradisional

Pada peran ini perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta

segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan figure yang paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan.

b. Peran Transisi

Perempuan yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja perempuan atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, perempuan dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan di bidang industri peluang bagi perempuan untuk bekerja sebagai buruh industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mencari nafkah.

c. Peran Kontemporer

Tujuan idealnya menjadi pekerja karena termasuk didalamnya perjuangan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah termasuk dalam rangkaian tugas keawajiban muslim. Bertolak dari hadis yang menyatakan bahwa mencari nafkah yang halal itu wajib bagi muslim, maka setiap muslim hendaknya memperhatikan bidang dan lapangan profesi yang akan yang dipilihnya. Allah SWT yang Maha Pemurah telah melapangkan medan dan lahan halal

demikian itu luas, tinggal upaya dan kemauan manusia sendiri menjawab tantangan tersebut. Berikut ini dikemukakan sejumlah bidang atau profesi yang dapat dipilih sesuai dengan kodrat dan bakat masingmasing.²⁶

D. Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Semantik Islam adalah ilmu multidimensi / interdisipliner, komprehensif dan terintegrasi, yang menggabungkan ilmu Islam dari Quran dan al-Hadits, dan ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan pengetahuan ini. Bisa mengendalikan Masalah dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu kebahagiaan.²⁷

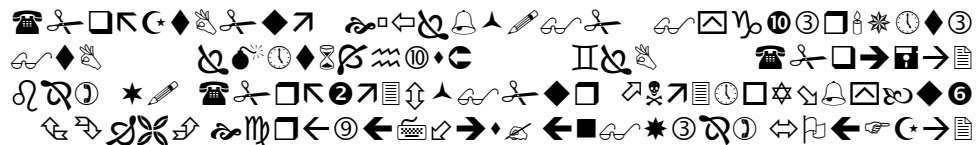
Islam menganggap harta adalah sebuah suatu anugrah dari Allah SWT. Manusia berhak mencari harta hingga menggunakannya untuk berbagai macam kebaikan. Islam membolehkan pencarian harta dengan berbagai macam cara, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, karena sebab dan alasan yang bertentangan dengan ajaran kebaikan dalam islam.²⁸

²⁶ Muh. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27

²⁷ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.91.

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h.232

Sebagaimana firman Allah SWT :



 Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.* (Al-Baqoroh: 172).²⁹

Maksud dari ayat diatas adalah jika kamu ingin mencari rezeki maka carilah yang halal, makanlah kamu dengan rezeki yang halal tersebut yang telah allah berikan kepadamu dan jangan lupa bersyukur kepada allah jika kamu sungguh-sungguh kamu menyembah allah.

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang ilhami oleh nilai-nilai islam.³⁰ Menurut Umar Chapra, ekonomi islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari anjuran juga aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan Allah dan masyarakat.³¹

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan disamping juga anjuran sebagai ibadah, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu dalam suarh Al-Baqarah : 267

²⁹ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. al-A'raf: 31, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2005, h. 15

³⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Studi Pengantar*: (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 13

³¹ Umer Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insane Perss, 2001), h. 121



Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya. (Q.s. Al-Baqarah : 276)

Penjelasan dari ayat diatas ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya yaitu Allah SWT. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum yang telah diajarkan oleh syariat islam, untuk itu tidak diperbolehkan berperilaku kikir dan boros. Al-Ghazali mengatakan tanpa pembagian yang sukarela, muncul dua hal yang patut dipersalahkan, yaitu kikir dan boros. Boros mengakibatkan perbuatan- perbuatan jahat dan kikir mengakibatkan penimbunan uang yang membiarkannya dan tidak membelanjakannya.³²

Sedangkan pengertian ekonomi islam menurut beberapa para ahli ekonomi islam sebagai berikut :

- a. Muhammad Abdul Manam memberikan pengertian ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

³² Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Op.Cit. h. 131

ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai islam.³³

- b. M. Umer Chapra mendefenisikan bahwa ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.³⁴
- c. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. System ini bertolak dari Allah SWT, bertujuan kahir kepada Allah SWT, dan menggunakan saran yang tidak lepas dari syar'at Allah.³⁵

Masih ada banyak lagi para ahli yang mendefenisikan pengertian dari ekonomi islam, dari 3 para ahli di atas maka dapat didefenisikan sebagai segala praturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu dan berfungsi untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan hidup manusia, yang menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.³⁶

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

³³ Veithal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 325

³⁴ Idri, Titik Triwulan Titik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2008), h. 13

³⁵ Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel di akses pada tanggal 09 maret 2017 di <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>

³⁶ M ismail Yusanto dan M Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Bogor: Al-Ahar Press, 2009) h.13

Prinsip dan tujuan sistem ekonomi islam terdapat dalam ajaran syari'at Islam yang di kembangkan dan kemudian di jabarkan oleh para ulama dan para pemikir-pemikir muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi islam: Ketauhidan (Tauhid), dan kekhalifahan

- a. *Tauhid*, ialah mewujudkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apapun yang dilakukan harus ada tanggung jawab. Umer Chapra menyebutkan bahwa batu fondasi keimanan yaitu Tauhid, dimana konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strategisnya. Tauhid mengandung pengertian bahwa alam semesta di gambarkan dan diciptakan secara sengaja oleh Allah yang maha kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan ia tidak terjadi karena suatu kebetulan *accident*.³⁷
- b. Khalifah, ialah sebuah kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap : berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syariat islam, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia dimuka bumi ini.³⁸

³⁷ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, h. 32

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur Nor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Formal Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 66

